



PROFIL

KELURAHAN WINONGO 2024



DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: WINONGO
Kecamatan: MANGUHARJO
Kota: KOTA MADIUN
Provinsi: JAWA TIMUR
Bulan: 12
Tahun: 2024

Nama Pengisi: RATIH PUSPITASARI,S.A
Pekerjaan: ASN
Jabatan: KASI PEMERINTAHAN
Kepala Desa / Lurah: AGUS PRAYITNA, S.Sos
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGISI PROFIL
DESA/KELURAHAN
Referensi 1 :
Referensi 2:
Referensi 3:
Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk			
Jumlah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah penduduk tahun ini	3736 orang	4043 orang	
Jumlah penduduk tahun lalu	3745 orang	3983 orang	
Persentase perkembangan	-0.24 %	1.51 %	
B. Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	2078 KK	875 KK	2953 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	2069 KK	859 KK	2928 KK
Prosentase Perkembangan	0.43 %	1.86 %	

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	3952 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	2443 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1557 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2680 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	46 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	13 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	6 orang
B. Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	57 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	326 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	1698 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	956 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	624 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	3661 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN							
Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Padi sawah	20	5	38500000	1465000	190000	850000	1300000
B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN							
Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
C. SUBSEKTOR PETERNAKAN							
Jenis Produksi	Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)		
D. SUBSEKTOR PERIKANAN							
Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan	

[illegible]

Jumlah perusahaan jasa	Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M.1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 0,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
N.1. Subsektor Listrik	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	3 Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp 7.500.000,00
Jumlah total nilai transaksi	Rp 7.000.000,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 2.000.000,00
N.2. Subsektor Gas	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	0 jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00
Nilai transaksi	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.3. Subsektor Air Minum	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	5 jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 65.000.000,00
Nilai produksi air minum	Rp 80.000.000,00
Nilai transaksi air minum	Rp 75.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 8.000.000,00
IV. PENDAPATAN PERKAPITA	
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha	
A.1. Pertanian	
1. Jumlah rumah tangga	25 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	65 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	6 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	11 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 2.800.000,00
A.2. Perikanan	
1. Jumlah rumah tangga	0 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
A.3. Kerajinan	
1. Jumlah rumah tangga	20 Keluarga

2. Jumlah total anggota rumah tangga	65 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	5 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	46 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 3.400.000,00
A.4. Kehutanan	
1. Jumlah rumah tangga	0 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
A.5. Jasa dan perdagangan	
1. Jumlah rumah tangga	20 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	46 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	10 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	20 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 3.000.000,00
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA	
Jumlah Kepala Keluarga	2985 KK
Jumlah Anggota Keluarga	7865 orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 60.500.000,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 5.600.000,00
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR	
1. Sektor Pertanian	
Petani	7 orang
Buruh Tani	60 orang
Pemilik Usaha Tani	35 orang
2. Sektor Perkebunan	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	2 orang
Buruh perkebunan	6 orang
Pemilik usaha Perkebunan	3 orang
3. Sektor Peternakan	
Peternakan Perorangan	4 orang
Buruh Usaha Peternakan	20 orang
Pemilik Usaha Peternakan	20 orang
4. Sektor Perikanan	
Nelayan	0 orang
Buruh Usaha Perikanan	0 orang
Pemilik Usaha Perikanan	0 orang
5. Sektor Kehutanan	
Pengumpul Hasil Hutan	0 orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
Penambang Galian C Perorangan	0 orang
Buruh Usaha Pertambangan	0 orang
Pemilik Usaha Pertambangan	0 orang
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
Montir	3 orang
Tukang kayu	2 orang
Pemulung	3 orang
Tukang jahit	5 orang
Tukang rias	2 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	3 orang
8. Sektor Industri Menengah dan Besar	
Karyawan perusahaan swasta	1986 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	70 orang
Pemilik perusahaan	2 orang
9. Sektor Perdagangan	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	20 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	15 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	25 orang
10. Sektor Jasa	

Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	0 orang
Pegawai Negeri Sipil	375 orang
TNI	90 orang
POLRI	80 orang
Dokter swasta	8 orang
Bidan swasta	13 orang
Dukun/paranormal/supranatural	0 orang
Dosen swasta	20 orang
Notaris	1 orang
Buruh migran perempuan	6 orang
Buruh migran laki-laki	8 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	3 orang

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

A. ASET TANAH	
Tidak memiliki tanah	200 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	75 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	25 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	20 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	25 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	37 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	16 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	26 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	10 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	16 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	5 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	3 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	0 orang
Jumlah total penduduk	0 orang
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM	
Memiliki ojek	46 orang- 46 unit
Memiliki becak	10 orang- 10 unit
Memiliki cidemo/andong/dokar	0 orang- 0 unit
Memiliki kapal motor	0 orang- 0 unit
Memiliki bus	0 orang- 0 unit
Memiliki mini bus	1 orang- 1 unit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	0 orang- 0 unit
C. ASET SARANA PRODUKSI	
Memiliki penggilingan padi	7 orang
Memiliki traktor	5 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	1 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	5 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	2 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	6 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	61 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	0 orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING	
Tembok	2875 rumah
RUMAH MENURUT LANTAI	
Keramik	2863 rumah
Semen	26 rumah
Kayu	0 rumah
Tanah	0 rumah
RUMAH MENURUT ATAP	
Genteng	2867 rumah
Seng	22 rumah
Asbes	26 rumah
Beton	0 rumah
Bambu	0 rumah
Kayu	0 rumah
Daun lontar/gebang/enau	0 rumah
Daun ilalang	0 rumah
Daun Sagu	0 rumah

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	1655 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	2896 Keluarga

Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya	136 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	8 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional	15 Keluarga

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	0 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	486 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	2 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	456 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	985 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	203 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	576 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	989 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	4 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	6 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	2987 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	4 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	18 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	3 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	25 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	22 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	278 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	83 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	789 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	9 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	45 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	3 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	13 orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	1758 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	1586 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	0 orang
C. Rasio Guru dan Murid	
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	24 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	196 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	56 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	536 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	6 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	6 orang
7. Jumlah guru SLTA/ sederajat	45 orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	236 orang
9. Jumlah siswa SLB	0 orang
10. Jumlah guru SLB	0 orang
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan	1 unit
Jumlah perpustakaan keliling	0 unit
Jumlah sanggar belajar	0 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	8 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	0 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	6 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	22 orang

IX. KESEHATAN MASYARAKAT

A. Kualitas Ibu Hamil	
Jumlah ibu hamil	64 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	68 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	76 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang

Jumlah ibu hamil melahirkan	23 orang
Jumlah ibu nifas	0 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	0 orang
B. Kualitas Bayi	
Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	6 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	64 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang
C. Kualitas Persalinan	
Tempat Persalinan	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	2 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	2 unit
Tempat persalinan Puskesmas	2 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	0 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	6 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	25 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
D. Cakupan Imunisasi	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	40 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	40 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	48 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	48 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	20 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	20 orang
Jumlah bayi 9 bulan	15 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	10 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	15 orang
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	826 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	2.365 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	5.366 pasangan
Keluarga Berencana	
Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	1 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	2 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	6 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	10 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	5.347 orang
F. Wabah Penyakit	
Demam berdarah	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	7 kejadian
Jumlah yang meninggal	1 kejadian
G. Angka Harapan Hidup	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	90,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	90,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	90,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	90,00 Tahun
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih	

1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	7 Keluarga	
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	3.366 Keluarga	
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga	
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	545 Keluarga	
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga	
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga	
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 Keluarga	
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga	
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga	
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga	
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 Keluarga	
Total jumlah keluarga	3.918 Keluarga	
I. Perilaku hidup bersih dan sehat		
Kebiasaan buang air besar		
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	2.333 Keluarga	
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	15 Keluarga	
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga	
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	50 Keluarga	
Pola makan		
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Tidak	
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Tidak	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali		
Kebiasaan berobat bila sakit		
Dukun Terlatih	Tidak ada	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Banyak	
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Sedikit	
Paranormal		
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Sedikit	
Tidak diobati	Sedikit	
J. Status Gizi Balita		
Jumlah Balita	237 orang	
Jumlah Balita bergizi buruk	0 orang	
Jumlah Balita bergizi baik	236 orang	
Jumlah Balita bergizi kurang	1 orang	
Jumlah Balita bergizi lebih	0 orang	
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini		
Jenis penyakit	Jumlah penderita	Di rawat di
Jantung	3 orang	Rumah sakit
Stroke	6 orang	Rumah sakit
Ginjal	1 orang	Rumah
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat		
Jumlah MCK Umum	26 unit	
Jumlah Posyandu	11 unit	
Jumlah kader Posyandu aktif	11 orang	
Jumlah pembina Posyandu	5 orang	
Jumlah Dasawisma	123 Dasawisma	
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	32 orang	
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	10 orang	
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	5 orang	
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi	
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi	
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi	
Buku administrasi Posyandu lainnya	5 jenis	
Jumlah kegiatan Posyandu	2 jenis	
Jumlah kader kesehatan lainnya	5 orang	
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	2 jenis	
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	3 jenis	
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	2 jenis	
Lainnya	3 jenis	
X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
A. Konflik SARA		
Kasus konflik pada tahun ini	0 kasus	
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus	
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus	
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus	
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus	
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus	
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus	

Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
B. Perkelahian	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
C. Pencurian	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 kasus
Jumlah pengedar Narkoba	0 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
G. Prostitusi	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
Lokalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
I. Penculikan	
Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
J. Kejahatan seksual	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	kasus

Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	0 orang
Jumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	0 orang
Jumlah orang cacat fisik	0 orang
Jumlah orang kelainan kulit	0 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 unit
Jumlah panti jompo	0 unit
Jumlah panti asuhan anak	0 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	0 orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	0 orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	0 orang
Jumlah janda	0 orang
Jumlah duda	0 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	0 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	10 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	764 orang
Jumlah penduduk eks NAPI	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	0 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	0 orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 orang
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus
M. Teror dan Intimidasi	
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	0 kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta	
Organisasi Siskamling	Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	37 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	45 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas	1 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	2 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	1 Pos

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	5 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	5 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	4 jenis

Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	3 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	5 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	5 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis
Jumlah Wajib Pajak	2698 orang
Target PBB	Rp 599.706.065,00
Realisasi PBB	86,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	0 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	0 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus
C. Partisipasi Politik	
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	5900 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	5900 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	11 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	5 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	22 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	2 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	5890 pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	5900 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	5868 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	5890 pemilih
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas
Penentuan Sekretaris Desa	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	
Masa jabatan Kepala Desa	0 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	Ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota secara langsung
4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	0 orang
Penentuan anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung

Pemilihan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa 57 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 24 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 12 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 12 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 12 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 12 kali

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	60 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Keputusan Lurah
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	13 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	Dipilih oleh rakyat secara langsung
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Dipilih oleh rakyat secara langsung
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	4 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	2 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	Memadai
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	65,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	Ada dan terisi
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	Berfungsi

C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	49 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	90,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	55,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	10,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	3,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	98,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	98,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	95,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	15 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	0 . kegiatan

2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	75,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	75,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	20 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	2 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	100,00 %

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	75,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	65,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Ada
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	10 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	35 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	50 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	1 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	1 kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	
Jumlah kelompok arisan	50 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	845 orang
Ada tidaknya dana sehat	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada
4. Adat Istiadat	
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	9999
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Aktif
5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	1
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	1 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	1 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	0 kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	1
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	1
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	0
Etos Kerja Penduduk	
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	1
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	0
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	0
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	1
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	0
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	0

Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	0
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	0
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	0
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	0
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	0
XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Tidak
Jumlah kegiatan	Jenis
B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
1. LKD/LKK	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	
XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	
A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 874.079.523,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 874.079.523,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 0,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 0,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 667.024.632,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 0,00
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah	
Penyampaian laporan keterangan pertanggungungan jawab Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	1 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	11 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	1 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	1 kasus
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
Gedung Kantor	Ada - Baik
Jumlah ruang kerja	5 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Ada
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	0 buah
Jumlah meja	10 buah
Jumlah kursi	150 buah
Jumlah almari arsip	8 buah
Komputer	6 unit
Mesin fax	0 unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	5 unit
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	Ada dan Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada dan Terisi
Buku Data Inventaris	Ada dan Terisi
Buku Data Aparat	Ada dan Terisi

Buku Data Tanah Kas Desa	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah	Ada dan Terisi
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Ada dan Terisi
Buku Agenda Ekspedisi	Ada dan Terisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan	Ada dan Terisi
Buku Data Induk Penduduk	Tidak Ada
Buku Data Mutasi Penduduk	Tidak Ada
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	Ada dan Terisi
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Penduduk Sementara	Tidak Ada
Buku Anggaran Penerimaan	Tidak Ada
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	Tidak Ada
Buku Kas Umum	Tidak Ada
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Tidak Ada
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	Tidak Ada
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada dan Terisi
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai BPD	-
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Ada
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	Ada
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	Ada
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Tidak
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	4 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	1 kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	12 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	4 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	1
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	1
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	1
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	3 kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	4 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	2 jenis

Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	3 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	2 jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	2 jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	2 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	2 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	2 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	0 jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	0 jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	1 jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	1 jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1 jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	0 jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	1 jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	1 jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	2 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	1 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	1 jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	1 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	1 jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	1 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	0 kasus
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	kali
KOTA MADIUN, 25 Juli 2024	
WINONGO	
Kecamatan MANGUHARJO	
Kota KOTA MADIUN	
AGUS PRAYITNA, S.Sos	
Lurah	
Tembusan :	
1. Camat MANGUHARJO	
2. Walikota KOTA MADIUN	
3. Arsip	



PROFIL

KELURAHAN WINONGO 2024



DAFTAR ISIAN
TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN

Desa: WINONGO
Kecamatan: MANGUHARJO
Kota: KOTA MADIUN
Provinsi: JAWA TIMUR
Bulan: 12
Tahun: 2024

Nama Pengisi: RATIH PUSPITASARI,S.A
Pekerjaan: ASN
Jabatan: KASI PEMERINTAHAN
Kepala Desa / Lurah: AGUS PRAYITNA, S.Sos
SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN
UNTUK MENGISI PROFIL
DESA/KELURAHAN
Referensi 1 :
Referensi 2:
Referensi 3:
Referensi 4:

I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

A. Jumlah Penduduk			
Jumlah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	
Jumlah penduduk tahun ini	3736 orang	4043 orang	
Jumlah penduduk tahun lalu	3745 orang	3983 orang	
Persentase perkembangan	-0.24 %	1.51 %	
B. Jumlah Keluarga			
Jumlah	KK Laki-laki	KK Perempuan	Jumlah Total
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini	2078 KK	875 KK	2953 KK
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu	2069 KK	859 KK	2928 KK
Prosentase Perkembangan	0.43 %	1.86 %	

II. EKONOMI MASYARAKAT

A. Pengangguran	
1. Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	3952 orang
2. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	2443 orang
3. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	1557 orang
4. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh	2680 orang
5. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu	46 orang
6. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja	13 orang
7. Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja	6 orang
B. Kesejahteraan Keluarga	
1. Jumlah keluarga prasejahtera	57 keluarga
2. Jumlah keluarga sejahtera 1	326 keluarga
3. Jumlah keluarga sejahtera 2	1698 keluarga
4. Jumlah keluarga sejahtera 3	956 keluarga
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus	624 keluarga
6. Total jumlah kepala keluarga	3661 keluarga

III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO

A. SUBSEKTOR PERTANIAN							
Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
Padi sawah	20	5	38500000	1465000	190000	850000	1300000
B. SUBSEKTOR PERKEBUNAN							
Tanaman	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi (Ton/Ha)	Nilai produksi (Rp)	Biaya pemupukan (Rp)	Biaya bibit (Rp)	Biaya obat (Rp)	Biaya lainnya (Rp)
C. SUBSEKTOR PETERNAKAN							
Jenis Produksi		Hasil Produksi	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Jumlah Ternak (Ekor)	
D. SUBSEKTOR PERIKANAN							
Jenis Produksi	Hasil Produksi (Ton/Tahun)	Nilai produksi (Rp)	Nilai Bahan Baku yg digunakan (Rp)	Nilai Bahan Penolong yg digunakan (Rp)	Total biaya antara yang dihabiskan (Rp)	Jenis usaha perikanan	

E. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN GALIAN									
Total nilai produksi tahun ini								Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan								Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan								Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabiskan								Rp. 0,00	
Jumlah total jenis bahan tambang dan galian yang ada								0 jenis	
F. SUBSEKTOR KERAJINAN									
Total nilai produksi tahun ini								Rp. 95.000.000,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan								Rp. 27.000.000,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan								Rp. 5.200.000,00	
Total biaya antara yang dihabiskan								Rp. 5.600.000,00	
Total jenis kerajinan rumah tangga								32 jenis	
G. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN									
H. SUBSEKTOR KEHUTANAN									
Total nilai produksi tahun ini								Rp. 0,00	
Total nilai bahan baku yang digunakan								Rp. 0,00	
Total nilai bahan penolong yang digunakan								Rp. 0,00	
Total biaya antara yang dihabiskan								Rp. 0,00	
I. SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN									
I.1. Subsektor Perdagangan Besar									
Total nilai transaksi								Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan yang ada								Rp. 0,00	
Total jumlah jenis perdagangan besar								Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluarkan								Rp. 0,00	
Total biaya antara lainnya								Rp. 0,00	
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran									
Jumlah total jenis perdagangan eceran								jenis	
Total nilai transaksi								Rp. 0,00	
Total nilai biaya yang dikeluarkan								Rp. 0,00	
Total nilai aset perdagangan eceran								Rp. 0,00	
I.3. Subsektor Hotel									
Jumlah total penginapan dan penyediaan akomodasi yang ada								jenis	
Jumlah total pendapatan								Rp. 0,00	
Jumlah total biaya pemeliharaan								Rp. 0,00	
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan								Rp. 0,00	
Jumlah total pendapatan yang diperoleh								Rp. 0,00	
I.4. Subsektor Restoran									
Jumlah tempat penyediaan konsumsi								Unit	
Biaya konsumsi yang dikeluarkan								Rp. 0,00	
Biaya antara lainnya								Rp. 0,00	
Jumlah total pendapatan yang diperoleh								Rp. 0,00	
J. Sektor Bangunan/Konstruksi									
Jumlah bangunan yang ada tahun ini								unit	
Biaya pemeliharaan yang dikeluarkan								Rp. 0,00	
Total nilai bangunan yang ada								Rp. 0,00	
Biaya antara lainnya								Rp. 0,00	
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan									
K.1. Subsektor Bank									
Jumlah transaksi perbankan								Rp. 0,00	
Jumlah nilai transaksi perbankan								Rp. 0,00	
Jumlah biaya yang dikeluarkan								Rp. 0,00	
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank									
Jumlah lembaga keuangan bukan bank								Unit	
Jumlah kegiatan jasa penunjang lembaga keuangan bukan bank								Jenis	
Nilai transaksi lembaga keuangan bukan bank								Rp. 0,00	
Biaya yang dikeluarkan								Rp. 0,00	
K.3. Subsektor Sewa Bangunan									
Jumlah usaha persewaan bangunan dan tanah								unit	
Total nilai persewaan yang dicapai								Rp. 0,00	
Biaya yang dikeluarkan								Rp. 0,00	
Biaya lainnya								Rp. 0,00	
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan									

Jumlah perusahaan jasa	Jenis
Nilai transaksi perusahaan jasa	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
Biaya lainnya	Rp. 0,00
L. SEKTOR JASA-JASA	
L.1. Subsektor jasa pemerintahan umum	
Jumlah jenis jasa pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	unit
Nilai transaksi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan	Rp. 0,00
L.2. Subsektor jasa swasta	
Jumlah usaha jasa pelayanan sosial yang disediakan masyarakat	jenis
Nilai aset produksi jasa pelayanan sosial	Rp. 0,00
Biaya yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.3. Subsektor Jasa hiburan dan rekreasi	
Jumlah jenis jasa hiburan dan rekreasi	jenis
Nilai transaksi usaha jasa hiburan dan rekreasi	Rp. 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp. 0,00
L.4. Subsektor Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	
Jumlah jenis kegiatan jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	jenis
Nilai aset jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Nilai transaksi jasa pelayanan perorangan dan rumah tangga	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
M. SEKTOR ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	
M.1. Subsektor Angkutan	
Jumlah jenis kegiatan pengangkutan orang dan barang dengan alat angkut kendaraan jalan raya, laut, rel, udara, dan sungai/danau/penyeberangan	Jenis
Jumlah total kendaraan angkutan	Unit
Nilai total transaksi pengangkutan	Rp 0,00
Nilai total biaya yang dikeluarkan	Rp 0,00
N. SEKTOR LISTRIK, GAS & AIR MINUM	
N.1. Subsektor Listrik	
Jumlah jenis kegiatan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik	3 Jenis
Jumlah nilai produksi listrik	Rp 7.500.000,00
Jumlah total nilai transaksi	Rp 7.000.000,00
Jumlah biaya antara yang dikeluarkan	Rp 2.000.000,00
N.2. Subsektor Gas	
Jumlah kegiatan penyediaan gas	0 jenis
Nilai aset produksi gas	Rp 0,00
Nilai transaksi	Rp 0,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 0,00
N.3. Subsektor Air Minum	
Jumlah jenis kegiatan penyediaan dan penyaluran air minum	5 jenis
Nilai aset penyediaan air minum	Rp 65.000.000,00
Nilai produksi air minum	Rp 80.000.000,00
Nilai transaksi air minum	Rp 75.000.000,00
Biaya antara yang dikeluarkan	Rp 8.000.000,00
IV. PENDAPATAN PERKAPITA	
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha	
A.1. Pertanian	
1. Jumlah rumah tangga	25 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	65 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	6 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	11 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 2.800.000,00
A.2. Perikanan	
1. Jumlah rumah tangga	0 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
A.3. Kerajinan	
1. Jumlah rumah tangga	20 Keluarga

2. Jumlah total anggota rumah tangga	65 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	5 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	46 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 3.400.000,00
A.4. Kehutanan	
1. Jumlah rumah tangga	0 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	0 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	0 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	0 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 0,00
A.5. Jasa dan perdagangan	
1. Jumlah rumah tangga	20 Keluarga
2. Jumlah total anggota rumah tangga	46 orang
3. Jumlah rumah tangga buruh tani	10 Keluarga
4. Jumlah anggota rumah tangga buruh	20 orang
5. Jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga	Rp 3.000.000,00
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA	
Jumlah Kepala Keluarga	2985 KK
Jumlah Anggota Keluarga	7865 orang
Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga	Rp 60.500.000,00
Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang bekerja	Rp 5.600.000,00
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR	
1. Sektor Pertanian	
Petani	7 orang
Buruh Tani	60 orang
Pemilik Usaha Tani	35 orang
2. Sektor Perkebunan	
Karyawan Perusahaan Perkebunan	2 orang
Buruh perkebunan	6 orang
Pemilik usaha Perkebunan	3 orang
3. Sektor Peternakan	
Peternakan Perorangan	4 orang
Buruh Usaha Peternakan	20 orang
Pemilik Usaha Peternakan	20 orang
4. Sektor Perikanan	
Nelayan	0 orang
Buruh Usaha Perikanan	0 orang
Pemilik Usaha Perikanan	0 orang
5. Sektor Kehutanan	
Pengumpul Hasil Hutan	0 orang
Buruh Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Hutan	0 orang
6. Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	
Penambang Galian C Perorangan	0 orang
Buruh Usaha Pertambangan	0 orang
Pemilik Usaha Pertambangan	0 orang
7. Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	
Montir	3 orang
Tukang kayu	2 orang
Pemulung	3 orang
Tukang jahit	5 orang
Tukang rias	2 orang
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	3 orang
8. Sektor Industri Menengah dan Besar	
Karyawan perusahaan swasta	1986 orang
Karyawan perusahaan pemerintah	70 orang
Pemilik perusahaan	2 orang
9. Sektor Perdagangan	
Karyawan Perdagangan Hasil Bumi	20 orang
Buruh Perdagangan Hasil Bumi	15 orang
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	25 orang
10. Sektor Jasa	

Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata	0 orang
Pegawai Negeri Sipil	375 orang
TNI	90 orang
POLRI	80 orang
Dokter swasta	8 orang
Bidan swasta	13 orang
Dukun/paranormal/supranatural	0 orang
Dosen swasta	20 orang
Notaris	1 orang
Buruh migran perempuan	6 orang
Buruh migran laki-laki	8 orang
Jasa penyewaan peralatan pesta	3 orang

VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT

A. ASET TANAH	
Tidak memiliki tanah	200 orang
Memiliki tanah antara 0,1-0,2 ha	75 orang
Memiliki tanah antara 0,21-0,3 ha	25 orang
Memiliki tanah antara 0,31-0,4 ha	20 orang
Memiliki tanah antara 0,41-0,5 ha	25 orang
Memiliki tanah antara 0,51-0,6 ha	37 orang
Memiliki tanah antara 0,61-0,7 ha	16 orang
Memiliki tanah antara 0,71-0,8 ha	26 orang
Memiliki tanah antara 0,81-0,9 ha	10 orang
Memiliki tanah antara 0,91-1,0 ha	16 orang
Memiliki tanah antara 1,0 – 5,0 ha	5 orang
memiliki tanah antara 5,0 – 10 ha	3 orang
Memiliki tanah lebih dari 10 ha	0 orang
Jumlah total penduduk	0 orang
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM	
Memiliki ojek	46 orang- 46 unit
Memiliki becak	10 orang- 10 unit
Memiliki cidemo/andong/dokar	0 orang- 0 unit
Memiliki kapal motor	0 orang- 0 unit
Memiliki bus	0 orang- 0 unit
Memiliki mini bus	1 orang- 1 unit
Memiliki helikopter dan atau pesawat	0 orang- 0 unit
C. ASET SARANA PRODUKSI	
Memiliki penggilingan padi	7 orang
Memiliki traktor	5 orang
Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian	1 orang
Memiliki kapal penangkap ikan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perikanan	0 orang
Memiliki alat pengolahan hasil peternakan	5 orang
Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan	2 orang
Memiliki alat pengolahan hasil hutan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata	0 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa perdagangan	6 orang
Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah	61 orang
Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri migas	0 orang
D. ASET PERUMAHAN RUMAH MENURUT DINDING	
Tembok	2875 rumah
RUMAH MENURUT LANTAI	
Keramik	2863 rumah
Semen	26 rumah
Kayu	0 rumah
Tanah	0 rumah
RUMAH MENURUT ATAP	
Genteng	2867 rumah
Seng	22 rumah
Asbes	26 rumah
Beton	0 rumah
Bambu	0 rumah
Kayu	0 rumah
Daun lontar/gebang/enau	0 rumah
Daun ilalang	0 rumah
Daun Sagu	0 rumah

VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA

Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya	1655 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya	2896 Keluarga

Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya	136 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki ternak kecil	8 Keluarga
Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional	15 Keluarga

VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Tingkat Pendidikan Penduduk	
Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin	0 orang
Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak	486 orang
Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental	2 orang
Jumlah penduduk sedang SD/ sederajat	456 orang
Jumlah penduduk tamat SD/ sederajat	985 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SD/ sederajat	203 orang
Jumlah penduduk sedang SLTP/ sederajat	576 orang
Jumlah penduduk tamat SLTP/ sederajat	989 orang
Jumlah penduduk sedang SLTA/ sederajat	4 orang
Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/ Sederajat	6 orang
Jumlah penduduk tamat SLTA/ Sederajat	2987 orang
Jumlah penduduk sedang D-1	4 orang
Jumlah penduduk tamat D-1	18 orang
Jumlah penduduk sedang D-2	3 orang
Jumlah penduduk tamat D-2	25 orang
Jumlah penduduk sedang D-3	22 orang
Jumlah penduduk tamat D-3	278 orang
Jumlah penduduk sedang S-1	83 orang
Jumlah penduduk tamat S-1	789 orang
Jumlah penduduk sedang S-2	9 orang
Jumlah penduduk tamat S-2	45 orang
Jumlah penduduk tamat S-3	3 orang
Jumlah penduduk sedang SLB A	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB A	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB B	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB B	0 orang
Jumlah penduduk sedang SLB C	0 orang
Jumlah penduduk tamat SLB C	0 orang
Jumlah penduduk cacat fisik dan mental	13 orang
B. Wajib belajar 9 tahun	
1. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun	1758 orang
2. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah	1586 orang
3. Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah	0 orang
C. Rasio Guru dan Murid	
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak	24 orang
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak	196 orang
3. Jumlah guru SD dan sederajat	56 orang
4. Jumlah siswa SD dan sederajat	536 orang
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat	6 orang
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat	6 orang
7. Jumlah guru SLTA/ sederajat	45 orang
8. Jumlah siswa SLTA/ sederajat	236 orang
9. Jumlah siswa SLB	0 orang
10. Jumlah guru SLB	0 orang
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat	
Jumlah perpustakaan desa/ kelurahan	1 unit
Jumlah taman bacaan desa/ kelurahan	1 unit
Jumlah perpustakaan keliling	0 unit
Jumlah sanggar belajar	0 unit
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah	8 kegiatan
Jumlah kelompok belajar Paket A	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket A	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket B	0 kelompok
Jumlah Peserta ujian Paket B	0 orang
Jumlah kelompok belajar Paket C	0 kelompok
Jumlah peserta ujian Paket C	0 orang
Jumlah lembaga kursus keterampilan	6 unit
Jumlah peserta kursus keterampilan	22 orang

IX. KESEHATAN MASYARAKAT

A. Kualitas Ibu Hamil	
Jumlah ibu hamil	64 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu	68 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas	76 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek	0 orang
Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih	0 orang
Jumlah kematian ibu hamil	0 orang

Jumlah ibu hamil melahirkan	23 orang
Jumlah ibu nifas	0 orang
Jumlah kematian ibu nifas	0 orang
Jumlah ibu nifas hidup	0 orang
B. Kualitas Bayi	
Jumlah keguguran kandungan	0 orang
Jumlah bayi lahir	6 orang
Jumlah bayi lahir mati	0 orang
Jumlah bayi lahir hidup	64 orang
Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan	0 orang
Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan	0 orang
Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg	0 orang
Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental	0 orang
C. Kualitas Persalinan	
Tempat Persalinan	
Tempat persalinan Rumah Sakit Umum	2 unit
Tempat persalinan Rumah Bersalin	2 unit
Tempat persalinan Puskesmas	2 unit
Tempat persalinan Polindes	0 unit
Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak	0 unit
Tempat persalinan rumah praktek bidan	0 unit
Tempat praktek dokter	0 unit
Rumah dukun	0 unit
Rumah sendiri	0 unit
Pertolongan Persalinan	
Jumlah Persalinan ditolong Dokter	6 tindakan
Jumlah persalinan ditolong bidan	25 tindakan
Jumlah persalinan ditolong perawat	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin	0 tindakan
Jumlah persalinan ditolong keluarga	0 tindakan
D. Cakupan Imunisasi	
Jumlah Bayi usia 2 bulan	40 orang
Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1	40 orang
Jumlah bayi usia 3 bulan	48 orang
Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2	48 orang
Jumlah bayi usia 4 bulan	20 orang
Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3	20 orang
Jumlah bayi 9 bulan	15 orang
Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak	10 orang
Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar	15 orang
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB	
Pasangan Usia Subur	
Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun	826 orang
Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun	2.365 orang
Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun	0 orang
Jumlah pasangan usia subur	5.366 pasangan
Keluarga Berencana	
Jumlah akseptor KB	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik	1 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral	2 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom	0 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil	0 orang
Jumlah pengguna metode vasektomi	6 orang
Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi	0 orang
Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah	0 orang
Jumlah pengguna metode KB obat tradisional	0 orang
Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode xxx	10 orang
Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB	5.347 orang
F. Wabah Penyakit	
Demam berdarah	
Jumlah kejadian dalam 1 tahun ini	7 kejadian
Jumlah yang meninggal	1 kejadian
G. Angka Harapan Hidup	
Angka harapan hidup penduduk Desa/Kelurahan	90,00 Tahun
Angka harapan hidup penduduk Kabupaten/Kota	90,00 Tahun
Angka Harapan Hidup Provinsi	90,00 Tahun
Angka harapan Hidup Nasional	90,00 Tahun
H. Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih	

1. Jumlah keluarga menggunakan sumur gali	7 Keluarga	
2. Jumlah keluarga pelanggan PAM	3.366 Keluarga	
3. Jumlah keluarga menggunakan Penampung Air Hujan	0 Keluarga	
4. Jumlah keluarga menggunakan sumur pompa	545 Keluarga	
5. Jumlah keluarga menggunakan perpipaan air kran	0 Keluarga	
6. Jumlah keluarga menggunakan hidran umum	0 Keluarga	
7. Jumlah keluarga menggunakan air sungai	0 Keluarga	
8. Jumlah keluarga menggunakan embung	0 Keluarga	
9. Jumlah keluarga yang menggunakan mata air	0 Keluarga	
10. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari air laut	0 Keluarga	
11. Jumlah keluarga yang tidak mendapatkan akses air minum dari sumber di atas	0 Keluarga	
Total jumlah keluarga	3.918 Keluarga	
I. Perilaku hidup bersih dan sehat		
Kebiasaan buang air besar		
Jumlah keluarga memiliki WC yang sehat	2.333 Keluarga	
Jumlah keluarga memiliki WC yang kurang memenuhi standar kesehatan	15 Keluarga	
Jumlah keluarga biasa buang air besar di sungai/parit/kebun/hutan	0 Keluarga	
Jumlah keluarga yang menggunakan fasilitas MCK umum	50 Keluarga	
Pola makan		
Kebiasaan penduduk makan dlm sehari 1 kali	Tidak	
Kebiasaan penduduk makan sehari 2 kali	Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari 3 kali	Ada	
Kebiasaan penduduk makan sehari lebih dari 3 kali	Tidak	
Penduduk yang belum tentu sehari makan 1 kali		
Kebiasaan berobat bila sakit		
Dukun Terlatih	Tidak ada	
Dokter/puskesmas/mantri kesehatan/perawat/bidan/posyandu	Banyak	
Obat tradisional dari dukun pengobatan alternatif	Sedikit	
Paranormal		
Obat tradisional dari keluarga sendiri	Sedikit	
Tidak diobati	Sedikit	
J. Status Gizi Balita		
Jumlah Balita	237 orang	
Jumlah Balita bergizi buruk	0 orang	
Jumlah Balita bergizi baik	236 orang	
Jumlah Balita bergizi kurang	1 orang	
Jumlah Balita bergizi lebih	0 orang	
K. Jumlah Penderita Sakit tahun ini		
Jenis penyakit	Jumlah penderita	Di rawat di
Jantung	3 orang	Rumah sakit
Stroke	6 orang	Rumah sakit
Ginjal	1 orang	Rumah
L. Perkembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat		
Jumlah MCK Umum	26 unit	
Jumlah Posyandu	11 unit	
Jumlah kader Posyandu aktif	11 orang	
Jumlah pembina Posyandu	5 orang	
Jumlah Dasawisma	123 Dasawisma	
Jumlah pengurus Dasa Wisma aktif	32 orang	
Jumlah kader bina keluarga balita aktif	10 orang	
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana aktif	5 orang	
Buku rencana kegiatan Posyandu	Diisi	
Buku data pengunjung Posyandu	Diisi	
Buku kegiatan pelayanan Posyandu	Diisi	
Buku administrasi Posyandu lainnya	5 jenis	
Jumlah kegiatan Posyandu	2 jenis	
Jumlah kader kesehatan lainnya	5 orang	
Jumlah kegiatan pengobatan gratis	2 jenis	
Jumlah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk/PSN	3 jenis	
Jumlah kegiatan pembersihan lingkungan	2 jenis	
Lainnya	3 jenis	
X. KEAMANAN DAN KETERTIBAN		
A. Konflik SARA		
Kasus konflik pada tahun ini	0 kasus	
Kasus konflik SARA pada tahun ini	0 kasus	
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar tetangga	0 kasus	
Jumlah kasus pertengkaran dan atau perkelahian antar RT/RW	0 kasus	
Jumlah konflik antar masyarakat pendatang dengan penduduk asli	0 kasus	
Jumlah kasus antar kelompok masyarakat dalam desa/kelurahan dengan kelompok masyarakat dari desa/kelurahan lain	0 kasus	
Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 kasus	

Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	Rp 0,00
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah korban jiwa akibat konflik antara masyarakat dengan perusahaan	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik antara masyarakat dan pemerintah	0 orang
Jumlah konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 kasus
Jumlah korban jiwa akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	0 orang
Jumlah kerugian material akibat konflik politik antara masyarakat dengan lembaga politik	Rp 0,00
Jumlah prasarana dan sarana yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 buah
Jumlah rumah penduduk yang rusak/terbakar akibat konflik Sara	0 rumah
Jumlah korban luka akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah korban meninggal akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah janda akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah anak yatim akibat konflik Sara	0 orang
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
B. Perkelahian	
Kasus perkelahian yang terjadi pada tahun ini	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan korban jiwa	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan luka parah	0 kasus
Kasus perkelahian yang menimbulkan kerugian material	0 kasus
Jumlah pelaku konflik yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
C. Pencurian	
Kasus pencurian dan perampokan yang terjadi tahun ini	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang korbannya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Kasus pencurian/perampokan yang pelakunya penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah pencurian dengan kekerasan senjata api	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
D. Penjarahan dan Penyerobotan Tanah	
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban dan pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban penduduk setempat tetapi pelakunya bukan penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penjarahan dan penyerobotan tanah yang korban bukan penduduk setempat tetapi pelakunya penduduk setempat	0 kasus
Jumlah pelaku yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
E. Perjudian, Penipuan dan Penggelapan	
Jumlah penduduk yang memiliki kebiasaan berjudi	0 orang
Jenis perjudian yang ada di Desa/Kelurahan ini	0 orang
Jumlah kasus penipuan dan atau penggelapan	0 orang
Jumlah kasus sengketa warisan, jual beli dan utang piutang	0 orang
F. Pemakaian Miras dan Narkoba	
Jumlah warung/toko yang menyediakan Miras	0 buah
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Miras	0 orang
Jumlah kasus mabuk akibat Miras	0 kasus
Jumlah pengedar Narkoba	0 orang
Jumlah penduduk yang mengkonsumsi Narkoba	0 orang
Jumlah kasus mabuk/teler akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah kasus kematian akibat Narkoba	0 kasus
Jumlah pelaku Miras yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
Jumlah pelaku Narkoba yang diadili atau diproses secara hukum	0 orang
G. Prostitusi	
Jumlah penduduk pekerja pramu nikmat	0 orang
Lokalisasi prostitusi	Tidak Ada
Jumlah tempat yang menyediakan wanita pramunikmat secara terselubung (warung remang-remang, panti pijat, hotel, dll)	0 buah
Jumlah kasus/konflik akibat maraknya praktek prostitusi	0 kasus
Jumlah pembinaan pelaku prostitusi	0 kali
Jumlah penertiban penyediaan tempat prostitusi	0 kali
H. Pembunuhan	
Jumlah kasus pembunuhan pada tahun ini	0 orang
Jumlah kasus pembunuhan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus pembunuhan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus bunuh diri	0 kasus
Jumlah Kasus Yang Diproses secara hukum	0 kasus
I. Penculikan	
Jumlah kasus penculikan	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan korban penduduk Desa/Kelurahan setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan dengan pelaku penduduk setempat	0 kasus
Jumlah kasus penculikan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
J. Kejahatan seksual	
Jumlah kasus perkosaan pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus perkosaan anak pada tahun ini	kasus
Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum negara	kasus

Jumlah kasus kehamilan di luar nikah menurut hukum adat	kasus
Jumlah tempat penampungan/persewaan kamar bagi pekerja seks	unit
K. Masalah Kesejahteraan Sosial	
Jumlah gelandangan	0 orang
Jumlah pengemis jalanan	0 orang
Jumlah anak jalanan dan terlantar	0 orang
Jumlah manusia lanjut usia terlantar	0 orang
Jumlah orang gila/stress/cacat mental	0 orang
Jumlah orang cacat fisik	0 orang
Jumlah orang kelainan kulit	0 orang
Jumlah orang yang tidur di kolong jembatan/emperan	0 orang
Jumlah rumah dan kawasan kumuh	0 unit
Jumlah panti jompo	0 unit
Jumlah panti asuhan anak	0 unit
Jumlah rumah singgah anak jalanan	0 unit
Jumlah penghuni jalur hijau dan taman kota	0 orang
Jumlah penghuni bantaran sungai	0 orang
Jumlah penghuni pinggiran rel kereta api	0 orang
Jumlah penghuni liar di lahan dan fasilitas umum lainnya	0 orang
Jumlah anggota kelompok masyarakat/suku/keluarga terasing, terisolir, terlantar dan primitif	0 orang
Jumlah anak yatim usia 0–18 tahun	0 orang
Jumlah anak piatu 0 - 18 tahun	0 orang
Jumlah anak yatim piatu 0–18 tahun	0 orang
Jumlah janda	0 orang
Jumlah duda	0 orang
Jumlah anak, remaja, preman dan pengangguran	0 orang
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/ sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah di SLTP/ sederajat	0 orang
Jumlah anak usia 15-18 tahun yang tidak sekolah di SLTA/ sederajat	0 orang
Jumlah anak yang bekerja membantu keluarga menghasilkan uang	10 orang
Jumlah perempuan yang menjadi kepala keluarga	764 orang
Jumlah penduduk eks NAPI	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana banjir	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gunung berapi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tsunami	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran rumah	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kekekeringan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana tanah longsor	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan bencana kebakaran hutan	0 orang
Jumlah penduduk rawan bencana kelaparan	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah rawan air bersih	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di daerah lahan kritis dan tandus	0 orang
Jumlah penduduk tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh	0 orang
Jumlah warga pendatang yang tidak memiliki keterangan penduduk	0 orang
Jumlah warga pendatang dan atau pekerja musiman	0 orang
L. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
Jumlah kasus kekerasan suami terhadap istri	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan istri terhadap suami	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan orang tua terhadap anak	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan anak terhadap orang tua	0 kasus
Jumlah kasus kekerasan kepala keluarga terhadap anggota keluarga lainnya	0 kasus
M. Teror dan Intimidasi	
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak dalam desa dan kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus intimidasi dan atau teror anggota masyarakat dari pihak luar desa atau kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus selebaran gelap dan atau isu yang bersifat teror dan ancaman untuk menimbulkan ketakutan penduduk	0 kasus
Jumlah kasus terorisme yang terjadi di desa dan kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus hasutan dan pemaksaan kehendak kelompok tertentu kepada masyarakat	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus teror dan intimidasi serta hasutan di masyarakat baik secara adat maupun hukum formal	0 kasus
N. Pelembagaan Sistem Keamanan Lingkungan Semesta	
Organisasi Siskamling	Ada
Organisasi Pertahanan Sipil dan Perlindungan Masyarakat	Ada
Jumlah RT atau sebutan lainnya yang ada Siskamling/Pos Ronda	37 RT
Jumlah anggota Hansip dan Linmas	45 orang
Jadwal kegiatan Siskamling dan Pos Ronda	Ada
Buku anggota Hansip dan Linmas	1 jenis
Jumlah kelompok Satuan Pengamanan (SATPAM) swasta	0 unit
Jumlah pembinaan Siskamling oleh Pengurus dan Kades/Lurah	2 kegiatan
Jumlah Pos Jaga Induk Desa/Kelurahan	1 Pos

XI. KEDAULATAN POLITIK MASYARAKAT

A. Kesadaran berpemerintahan, berbangsa dan bernegara	
Jenis kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	5 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan nilai Ideologi Pancasila sebagai Dasar Negara	5 kegiatan
Jenis-jenis kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	4 jenis

Jumlah kegiatan pemantapan nilai Bhinneka Tunggal Ika	3 kegiatan
Jenis kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	5 jenis
Jumlah kegiatan pemantapan kesatuan bangsa lainnya	5 kegiatan
Jumlah kasus warga desa/kelurahan yang minta suaka/lari ke luar negeri	0 kasus
Jumlah warga yang melintasi perbatasan ke negara tetangga secara resmi	0 orang
Jumlah warga yang melintasi perbatasan negara tetangga secara tidak resmi	0 orang
Jumlah kasus pertempuran atau perlawanan antar kelompok pengacau keamanan di perbatasan negara dengan warga/aparat dari desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah serangan terhadap fasilitas umum dan milik masyarakat oleh kelompok pengacau di desa/kelurahan perbatasan negara tetangga	0 kasus
Jumlah kasus yang diklasifikasikan merongrong keutuhan NKRI dan Kesatuan Bangsa Indonesia di desa/kelurahan tahun ini	0 kasus
Jumlah korban manusia baik luka maupun tewas serta korban materi lainnya akibat serangan kelompok pengacau keamanan	0 kasus
Jumlah masalah ketenagakerjaan di perbatasan antar negara yang terjadi tahun ini	0 kasus
Jumlah kasus kejahatan pencurian, penjarahan, perampokan dan intimidasi serta teror yang terjadi di desa/kelurahan perbatasan antar negara	0 kasus
Jumlah sengketa perbatasan antar negara yang terjadi desa/kelurahan ini	0 kasus
Jumlah kasus sengketa perbatasan yang terjadi baik antar desa/kelurahan dalam kecamatan maupun antar kecamatan, antar kabupaten/kota dan desa/kelurahan antar provinsi.	0 kasus
Jumlah kasus yang terkait dengan perbatasan antar negara yang dilaporkan Kepala Desa/Lurah ke pemerintah tingkat atasnya	0 kasus
Jumlah kasus yang mengarah kepada tindakan disintegrasi bangsa dan pengingkaran NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika yang difasilitasi penyelesaiannya oleh Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan asing di wilayah perairan desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penangkapan nelayan/petani/peternak/ pekebun/perambah hutan asal desa/kelurahan di perairan dan daratan wilayah negara lain	0 kasus
B. Kesadaran membayar Pajak dan Retribusi	
Jenis pajak yang dipungut sebagai kewenangan dan atau tugas desa/kelurahan	1 jenis
Jumlah Wajib Pajak	2698 orang
Target PBB	Rp 599.706.065,00
Realisasi PBB	86,00 %
Jumlah Tindakan terhadap penunggak PBB	0 tindakan
Jenis Retribusi yang dipungut sebagai tugas dan kewenangan desa/kelurahan	0 jenis
Jumlah wajib retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0 orang
Target retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi retribusi yang menjadi tugas/kewenangan desa/kelurahan	0,00 %
Jenis pungutan resmi lainnya di Desa/Kelurahan	0 jenis
Target pungutan resmi tingkat desa/kelurahan	Rp 0,00
Realisasi pungutan resmi di desa/kelurahan	0,00 %
Jumlah kasus pungutan liar	0 kasus
Jumlah penyelesaian kasus pungutan liar	0 kasus
C. Partisipasi Politik	
1. Jumlah Partai Politik dan Pemilihan Umum	
Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih	5900 orang
Jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif yang lalu	5900 orang
Jumlah perempuan dari penduduk desa/kelurahan ini yang aktif di partai politik	11 orang
Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa/Kelurahan ini	5 partai
Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah desa/kelurahan ini	0 partai
Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari desa/kelurahan	22 orang
Jumlah penduduk yang dipilih dalam Pemilu Legislatif yang lalu	2 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden/wakil	5890 pemilih
2. Pemilihan Kepala Daerah	
Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih	5900 orang
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati/Walikota lalu	5868 pemilih
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur yang lalu	5890 pemilih
3. Penentuan Kepala Desa/Lurah dan Perangkat Desa/Kelurahan	
Penentuan Jabatan Kepala Desa	Ditunjuk Pemerintah Tingkat Atas
Penentuan Sekretaris Desa	Ditunjuk, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota
Penentuan Perangkat Desa termasuk Kepala Dusun	
Masa jabatan Kepala Desa	0 tahun
Penentuan Jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan termasuk Kepala Lingkungan	Ditunjuk dan diangkat oleh Bupati/Walikota secara langsung
4. Pemilihan BPD	
Jumlah anggota BPD	0 orang
Penentuan anggota BPD	Dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat
Pimpinan BPD	Dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung

Pemilihan kantor/ruang kerja BPD	Ada
Anggaran untuk BPD	Ada
Produk keputusan BPD tahun ini	1. Peraturan Desa 57 buah 2. Permintaan keterangan dari Kepala Desa 24 kali 3. Rancangan Peraturan Desa. 0 buah 4. Menyalurkan aspirasi masyarakat 12 kali 5. Menyatakan pendapat kepada Kepala Desa 12 kali 6. Menyampaikan usul dan pendapat kepada Kepala Desa 12 kali 7. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan APB Desa 12 kali

5. Pemilihan dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan organisasi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	Ada
Dasar hukum keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD	
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa termasuk RT, RW, PKK, LKMD/K, LPM, Karang Taruna, Bumdes, Lembaga Adat, Kelompok Tani dan lembaga lainnya sesuai ketentuan	60 unit organisasi
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/LKK	Keputusan Lurah
Jumlah organisasi anggota lembaga kemasyarakatan kelurahan	13 unit organisasi
Pemilihan pengurus LKD/LKK	Dipilih oleh rakyat secara langsung
Pemilihan pengurus organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, LPM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, Bumdes, lembaga adat, kelompok tani dan organisasi anggota LKD/LKK lainnya	Dipilih oleh rakyat secara langsung
Implementasi tugas, fungsi dan kewajiban LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan LKD/LKK	4 kegiatan
Fungsi, tugas dan kewajiban lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	Aktif
Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan yang dijalankan organisasi anggota LKD/LKK	2 kegiatan
Alokasi anggaran untuk LKD/LKK	Ada
Alokasi anggaran untuk organisasi anggota LKD/LKK termasuk PKK, PM/LKMD/K, Karang Taruna, RT, RW, kelompok tani dan organisasi lainnya	Ada
Kantor dan ruangan kerja untuk LKD/LKK	Ada
Dukungan pembiayaan, personil dan ATK untuk Sekretariat LKD/LKK dari APB-Desa dan Anggaran Kelurahan/APBD	Memadai
Realisasi program kerja organisasi anggota LKD/LKK	65,00 %
Keberadaan Alat kelengkapan organisasi anggota LKD/LKK termasuk Dasawisma dan Pokja, Bidang, Seksi, Urusan, dan terisi tidaknya struktur organisasi anggota LKD/LKK	Ada dan terisi
Kegiatan administrasi dan Ketatausahaan LKD/LKK	Berfungsi

C. PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan/ Musrenbangdes/ kelurahan

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan pada tahun ini, termasuk di tingkat dusun dan lingkungan	49 kali
Jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat dusun/lingkungan dan desa/kelurahan	90,00 %
Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbang di desa/kelurahan	55,00 %
Jumlah peserta perempuan dalam Musrenbang di desa dan kelurahan	10,00 %
Jumlah Musyawarah Antar Desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan Kecamatan	3,00 %
Penggunaan Profil Desa/Kelurahan sebagai sumber data dasar yang digunakan dalam perencanaan pembangunan desa dan Forum Musrenbang Partisipatif	Ya
Penggunaan data BPS dan data sektoral dalam perencanaan pembangunan partisipatif dan Musrenbang di desa dan Kelurahan	Ya
Pelibatan masyarakat dalam pemutakhiran data profil desa dan kelurahan sebagai bahan dalam Musrenbang partisipatif	Ya
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	98,00 %
Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan dan dimuat dalam RAPB-Desa	98,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan	95,00 %
Usulan rencana kerja pemerintah tingkat atas yang ditolak dalam Musrenbangdes/kel	0 kegiatan
Pemilikan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan (RKPD/K)	Ada
Pemilikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD/K)	Ada
Pemilikan dokumen hasil Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di desa/kelurahan	Ada
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang tidak direalisasikan dalam APB-Desa, APB-Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi	15 . kegiatan
Jumlah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui forum Musrenbangdes/kel yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil Musrenbang	0 . kegiatan

2. Peranserta masyarakat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hasil Pembangunan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di desa dan kelurahan sesuai hasil Musrenbang	75,00 %
Jumlah penduduk yang dilibatkan dalam pelaksanaan proyek padat karya oleh pengelola proyek yang ditunjuk pemerintah desa/kelurahan atau kabupaten/kota	75,00 %
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang sudah ada sesuai ketentuan dalam APB-Desa	20 kegiatan
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan masyarakat sesuai ketentuan dalam APB-Daerah	2 kegiatan
Jumlah kegiatan yang masuk desa/kelurahan di luar yang telah direncanakan dan disepakati masyarakat saat Musrenbang	0,00 %
Usulan masyarakat yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa dan Kelurahan	100,00 %

Usulan Pemerintah Desa dan Kelurahan yang disetujui menjadi Rencana Kerja Desa/Kelurahan	75,00 %
Usulan rencana kerja program dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi dan pusat yang dibahas saat Musrenbang dan disetujui untuk dilaksanakan di desa dan kelurahan oleh masyarakat	65,00 %
Penyelenggaraan musyawarah desa/kelurahan untuk menerima, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah ada	Ada
Pelaksanaan kegiatan dari masyarakat untuk menyelesaikan atau menindaklanjuti kegiatan yang belum diselesaikan oleh pelaksana sebelumnya.	Ada
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaporkan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan di tingkat desa/kelurahan	0 kasus
Jumlah kasus penyimpangan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang diselesaikan secara hukum	0 kasus
Jenis kegiatan masyarakat untuk melestarikan hasil pembangunan yang dikoordinasikan pemerintah desa/kelurahan	10 Jenis
Jumlah kegiatan yang didanai dari APB-Desa dan swadaya masyarakat di kelurahan	35 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APB Daerah Kabupaten/Kota	50 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai dari APBD Provinsi	1 kegiatan
Jumlah kegiatan di desa dan kelurahan yang didanai APBN	1 kegiatan
3. Semangat Kegotongroyongan Penduduk	
Jumlah kelompok arisan	50 buah
Jumlah penduduk menjadi orang tua asuh	845 orang
Ada tidaknya dana sehat	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembangunan rumah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengolahan tanah	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pembiayaan pendidikan anak sekolah/kuliah/kursus	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemeliharaan fasilitas umum dan fasilitas sosial/prasarana dan sarana	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberian modal usaha	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pengerjaan sawah dan kebun	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam penangkapan ikan dan usaha peternakan lainnya	Tidak
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam peristiwa kematian	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong menjaga kebersihan Desa/Kelurahan	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong membangun jalan/jembatan/saluran air/irigasi	Ada
Ada tidaknya kegiatan gotong royong atau sambatan/sejenisnya dalam pemberantasan sarang nyamuk dan kesehatan lingkungan lainnya	Ada
4. Adat Istiadat	
Adat istiadat dalam perkawinan	Aktif
Adat istiadat dalam kelahiran anak	Aktif
Adat istiadat dalam upacara kematian	9999
Adat istiadat dalam pengelolaan hutan	Tidak
Adat istiadat dalam tanah pertanian	Aktif
Adat istiadat dalam pengelolaan laut/pantai	Tidak
Adat istiadat dalam memecahkan konflik warga	Tidak
Adat istiadat dalam menjauhkan bala penyakit dan bencana alam	Aktif
Adat istiadat dalam memulihkan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
Adat istiadat dalam penanggulangan kemiskinanbagi keluarga tidak mampu/fakir miskin/terlantar	Aktif
5. Sikap Dan Mental Masyarakat	
Jumlah jenis pungutan liar dari anak gelandangan di sudut jalanan	0 jenis
Jumlah jenis pungutan liar di terminal, pelabuhan dan pasar	0 jenis
Peminta-minta sumbangan perorangan dari rumah ke rumah	1
Peminta-minta sumbangan terorganisasi dari rumah ke rumah	0
Semakin berkembang praktek jalan pintas dalam mencari uang secara gampang walau tidak halal	0
Jenis pungutan dari RT atau sebutan lain kepada warga	1 jenis
Jenis pungutan dari RW atau sebutan lain kepada warga	1 jenis
Jenis pungutan dari desa/kelurahan kepada warga	0 jenis
Kasus aparat RT/RW atau sebutan lainnya di desa dan kelurahan yang dipecat kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya.	0 kasus
Dipindah karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Diberhentikan dengan hormat karena kena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Dimutasi karena kasus pungutan liar, pemerasan dan sejenisnya	0 kasus
Banyak masyarakat yang memberikan biaya lebih dari yang ditentukan sebagai uang rokok atau ucapan terima kasih dalam proses pelayanan administrasi di kantor desa/kelurahan	0
Banyak warga yang ingin mendapatkan pelayanan gratis dari aparat desa/kelurahan	1
Banyak penduduk yang mengeluhkan memburuknya kualitas pelayanan kepada masyarakat	0
Banyak kegiatan yang bersifat hiburan dan rekreasi yang diinisiatifi masyarakat sendiri	1
Masyarakat agak kurang toleran dengan keberadaan kelompok masyarakat dari unsur etnis, agama dan kelompok kepentingan lain	0
Etos Kerja Penduduk	
Luas Wilayah Desa/Kelurahan sangat luas	1
Banyak lahan terlantar yang tidak dikelola pemiliknya/petani berdasi	0
Banyak lahan pekarangan di sekitar perumahan yang tidak dimanfaatkan	0
Banyak lahan tidur milik masyarakat yang tidak dimanfaatkan	0
Jumlah petani pada musim gagal tanam/panen yang pasrah dan tidak mencari pekerjaan lain	0
Jumlah nelayan pada musim tidak melaut yang memanfaatkan keterampilan/keahlian lainnya untuk mencari pekerjaan lain	0
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di luar desa/kelurahan tetapi masih dalam wilayah kabupaten/kota	1
Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di kota besar lainnya	1
Kebiasaan masyarakat merayakan pesta dengan menghadirkan undangan yang banyak	0
Masyarakat sering mendatangi kantor desa dan lurah menuntut penyediaan kebutuhan dasar sembilan bahan pokok pada saat kelaparan dan kekeringan	0

Kebiasaan masyarakat untuk mencari/mengumpulkan bahan makanan pengganti beras/jagung pada saat rawan pangan/kelaparan/gagal panen	0
Kebiasaan pemotongan hewan dalam jumlah besar untuk pesta adat dan perayaan upacara tertentu	0
Kebiasaan masyarakat berdemonstrasi/protes terhadap kebijakan pemerintah	0
Kebiasaan masyarakat terprovokasi karena isu-isu yang menyesatkan	0
Kebiasaan masyarakat bermusyawarah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan	0
Lebih banyak masyarakat yang diam/masabodoh/apatis ketika ada persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya	0
Kebiasaan aparat pemerintah desa/kelurahan terlebih di tingkat RT, RW, Dusun dan Lingkungan yang kurang menanggapi kesulitan yang dihadapi masyarakat	0
XII. LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
A. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN	
Keberadaan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan/LKD/LK	Tidak
Jumlah kegiatan	Jenis
B. ORGANISASI ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN	
1. LKD/LKK	Ada
Kepengurusan	Aktif/tidak
Buku Administrasi	Jenis
Jumlah kegiatan	3 Jenis
Dasar hukum pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa	
Dasar hukum pembentukan lembaga kemasyarakatan kelurahan	
Dasar hukum pembentukan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	
XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN	
A. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan	
Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini	Rp 874.079.523,00
Sumber Anggaran	
APBD Kabupaten/Kota	Rp 874.079.523,00
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Provinsi	Rp 0,00
Bantuan Pemerintah Pusat	Rp 0,00
Pendapatan Asli Desa	Rp 0,00
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 0,00
Alokasi Dana Desa	Rp 0,00
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan	Rp 0,00
Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat	Rp 0,00
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan	Rp 667.024.632,00
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai	Rp 0,00
B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah	
Penyampaian laporan keterangan pertanggungungan jawab Kepala Desa kepada BPD	1
Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat	1 jenis
Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa	1
Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota	1
Jumlah jenis media informasi kinerja kepala desa dan lurah kepada masyarakat	11 jenis
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang disampaikan kepada kepala desa/lurah	1 kasus
Jumlah kasus pengaduan masyarakat terhadap masalah pembangunan, pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan yang diselesaikan kepala desa/lurah	1 kasus
C. Prasarana Dan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
1. PEMERINTAH DESA/KELURAHAN	
Gedung Kantor	Ada - Baik
Jumlah ruang kerja	5 Ruang
Balai Desa/Kelurahan/sejenisnya	Ada
Listrik	Ada
Air bersih	Ada
Telepon	Ada
1.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	0 buah
Jumlah meja	10 buah
Jumlah kursi	150 buah
Jumlah almari arsip	8 buah
Komputer	6 unit
Mesin fax	0 unit
Kendaraan Dinas Lurah/Kepala Desa	5 unit
1. B. Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
Buku Data Peraturan Desa	Ada dan Terisi
Buku Keputusan Kepala Desa/Lurah	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Kependudukan	Ada dan Terisi
Buku Data Inventaris	Ada dan Terisi
Buku Data Aparat	Ada dan Terisi

Buku Data Tanah Kas Desa	Ada dan Terisi
Buku Administrasi Pajak dan Retribusi	Ada dan Terisi
Buku Data Tanah	Ada dan Terisi
Buku Laporan Pengaduan Masyarakat	Ada dan Terisi
Buku Agenda Ekspedisi	Ada dan Terisi
Buku Profil Desa dan Kelurahan	Ada dan Terisi
Buku Data Induk Penduduk	Tidak Ada
Buku Data Mutasi Penduduk	Tidak Ada
Buku Rekapitulasi Penduduk Akhir Bulan	Ada dan Terisi
Buku Registrasi Pelayanan Penduduk	Ada dan Terisi
Buku Data Penduduk Sementara	Tidak Ada
Buku Anggaran Penerimaan	Tidak Ada
Buku Anggaran Pengeluaran Pegawai/Pembangunan	Tidak Ada
Buku Kas Umum	Tidak Ada
Buku Kas Pembantu Penerimaan	Tidak Ada
Buku Kas Pembantu Pengeluaran Rutin/Pembangunan	Tidak Ada
Buku Data Lembaga Kemasyarakatan	Ada dan Terisi
2. PRASARANA DAN SARANA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/BPD	
Gedung Kantor	
Jumlah ruang kerja	Ruang
Balai BPD	-
Listrik	
Air bersih	
Telepon	
2.A. Inventaris dan Alat tulis kantor	
Jumlah mesin tik	buah
Jumlah meja	buah
Jumlah kursi	buah
Jumlah almari arsip	buah
Komputer	unit
Mesin fax	unit
2.B. Administrasi BPD	
Buku-buku administrasi kegiatan BPD	
Buku Buku Administrasi Keanggotaan	
Buku kegiatan BPD	
Buku himpunan peraturan desa	
Buku Lainnya	
3. PRASARANA DAN SARANA DUSUN/LINGKUNGAN/SEBUTAN LAIN	
Gedung kantor atau Balai Pertemuan	
Alat tulis kantor	
Barang inventaris	Jenis
Buku administrasi	Jenis
Jenis kegiatan	Jenis
Jumlah pengurus	Orang
Jumlah ruang kerja	Ruang
D. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
1. Jenis Pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan	Ada
Pedoman dan standar bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa dan kelurahan	Ada
Pedoman umum administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	Ada
Pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah dan PerangkatDesa/Kelurahan serta BPD	Ada
Pedoman pendidikan dan pelatihan bagi pemerintahan desa, kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan perangkat masing-masing	Tidak
Jumlah bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	12 kegiatan
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	4 kegiatan
Penelitian dan pengkajian penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	1 kegiatan
Jumlah kegiatan yang terkait dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan desa dan kelurahan dalam bidang ekonomi keluarga, penanganan bencana, penanggulangan kemiskinan, percepatan keberdayaan masyarakat, peningkatan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pengembangan sosial budaya masyarakat di desa dan kelurahan yang dibiayai APBN	12 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	4 kali
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kali
2. Pembinaan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi ke desa/kelurahan	1
Pedoman bantuan keuangan dari provinsi	1
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	1
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala provinsi	3 kegiatan
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	4 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD Provinsi untuk desa dan kelurahan	2 jenis

Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	3 jenis
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana desa dan kelurahan yang dibiayai APBD Provinsi yang masuk desa dan kelurahan	2 jenis
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna yang dibiayai APBD Provinsi di desa dan kelurahan	2 jenis
Kegiatan pengembangan sosial budaya masyarakat Pedoman pendataan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	2 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	2 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan	2 jenis
3. Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintahan Desa dan Kelurahan	
Pelimpahan tugas Bupati/Walikota kepada Lurah dan Kepala Desa	0 jenis
Penetapan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa	0 jenis
Pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa	1 jenis
Pedoman teknis penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa, keputusan Lurah dan peraturan daerah kepada kepala desa dan lurah.	1 jenis
Pedoman teknis penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif serta pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	1 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	1 jenis
Penetapan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa	0 jenis
Fasilitasi Pelaksanaan pedoman administrasi, tata naskah dan pelaporan bagi kepala desa dan lurah	1 jenis
Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan berskala kabupaten/kota	1 jenis
Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dibiayai APBD kabupaten/kota yang masuk desa dan kelurahan	2 jenis
Kegiatan penanganan bencana yang dibiayai APBD kabupaten/kota untuk desa dan kelurahan	1 jenis
Kegiatan peningkatan pendapatan keluarga yang dibiayai APBD kabupaten/kota di desa dan kelurahan	1 jenis
Fasilitasi penetapan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi Kepala Desa, Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD	1 jenis
Kegiatan fasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat dan lembaga adat beserta hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan	0 jenis
Pedoman pendataan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan	1 jenis
Program dan kegiatan pemeliharaan motivasi desa/kelurahan berprestasi pascaperlombaan desa dan kelurahan	1 jenis
Pemberian penghargaan atas prestasi yang dicapai pemerintahan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	1 jenis
Pemberian sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa, lurah dan perangkat masing-masing	0 kasus
Mengawasi pengelolaan keuangan desa serta anggaran kelurahan dan pendayagunaan aset pemerintahan desa, badan usaha milik desa dan sumber pendapatan daerah yang dikelola lurah	0 kasus
4. Pembinaan dan Pengawasan Camat kepada Desa/Kelurahan	
Jumlah Kegiatan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	kali
Jumlah Kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan	kali
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa serta anggaran kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa	kali
Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan	kali
Fasilitasi penyediaan data dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, wewenang, fungsi, hak dan kewajiban kepala desa, BPD, Lurah dan lembaga kemasyarakatan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	kali
Fasilitasi penataan, penguatan dan efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan dan pelestarian hasil pembangunan.	kali
Fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan dan kerjasama desa/kelurahan dengan pihak ketiga	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan pemeliharaan motivasi bagi desa dan kelurahan juara perlombaan dan pasca perlombaan	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan dengan organisasi anggota lembaga kemasyarakatan serta dengan pihak ketiga sebagai mitra percepatan keberdayaan masyarakat	kali
Jumlah kegiatan fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan organisasi anggotanya	kali
Jumlah kegiatan koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.	kali
KOTA MADIUN, 25 Juli 2024	
WINONGO	
Kecamatan MANGUHARJO	
Kota KOTA MADIUN	
AGUS PRAYITNA, S.Sos	
Lurah	
Tembusan :	
1. Camat MANGUHARJO	
2. Walikota KOTA MADIUN	
3. Arsip	